



PEMERINTAH KOTA BEKASI
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Juanda Nomor 100, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat 17144,
Telepon:(021)22102950, Faksimile:(021)22102950,
Pos-el:opd.dpmpstsp@bekasikota.go.id, laman:http://dpmpstsp.bekasikota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.3.1/Kep. 44 /DPMPSTP.Set/IX/2025**

TENTANG



**PETA PROSES BISNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI
TAHUN 2024-2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 melalui Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 000.8.3.1/Kep.559-Org/XII/2024 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, perlu disusun peta proses bisnis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
- b. bahwa untuk mencapai Sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi, perlu disusun peta proses bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ~~din~~ dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun 2024-2026;


Paraf Koordinasi	
Plt. Sekretaris DPMPSTP	
Kabag Organisasi	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Paraf Koordinasi	
Pt. Sekretaris DPMPSTP	
Kabag Organisasi	

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 37);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 13);



Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 000.8.3.1/Kep.559-Org/XII/2024 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;

Paraf Koordinasi	
Plt. Sekretaris DPMPSTP	r
Kabag Organisasi	A 

2. Berita Acara Rapat Nomor : 000.8.3.1/199-BA /DPMPTSP.Set tanggal 1 September 2025 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :



- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun 2024-2026.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri atas :
1. Peta Proses Bisnis Level 0 memuat seluruh proses bisnis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi yang merupakan turunan dari Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
 2. Peta Proses Bisnis Level 1 merupakan penjabaran/turunan dari peta proses bisnis Level 0, yang menggambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di Level 0;
 3. Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n), merupakan penjabaran/turunan dari proses bisnis Level 1 dan diturunkan sampai dengan level terkecil; dan
 4. Peta Lintas Fungsi/*Cross Functional Map* (CFM), merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

Paraf Koordinasi	
Plt. Sekretaris DPMPTSP	
Kabag Organisasi	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 September 2025

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI,

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris DPMPSTP	
Kabag Organisasi	



PRIADI SANTOSO

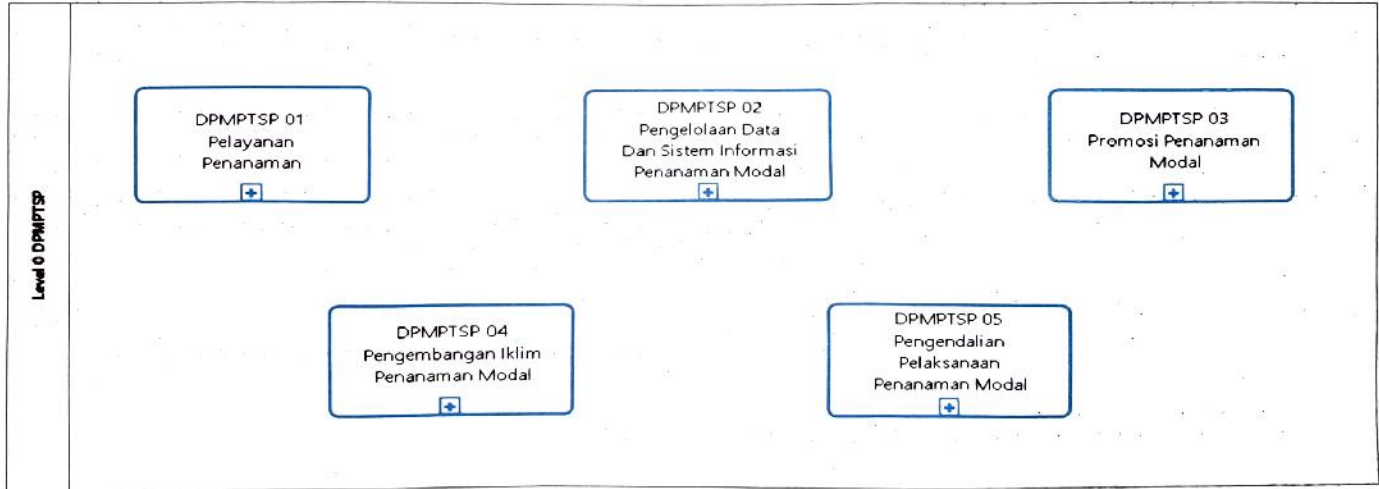
Tembusan Yth. :

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.3.1/Kep. -DPMPTSP.Set/IX/2025
TENTANG PETA PROSES BISNIS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI TAHUN
2024-2026

PETA PROSES BISNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI
TAHUN 2024-2026

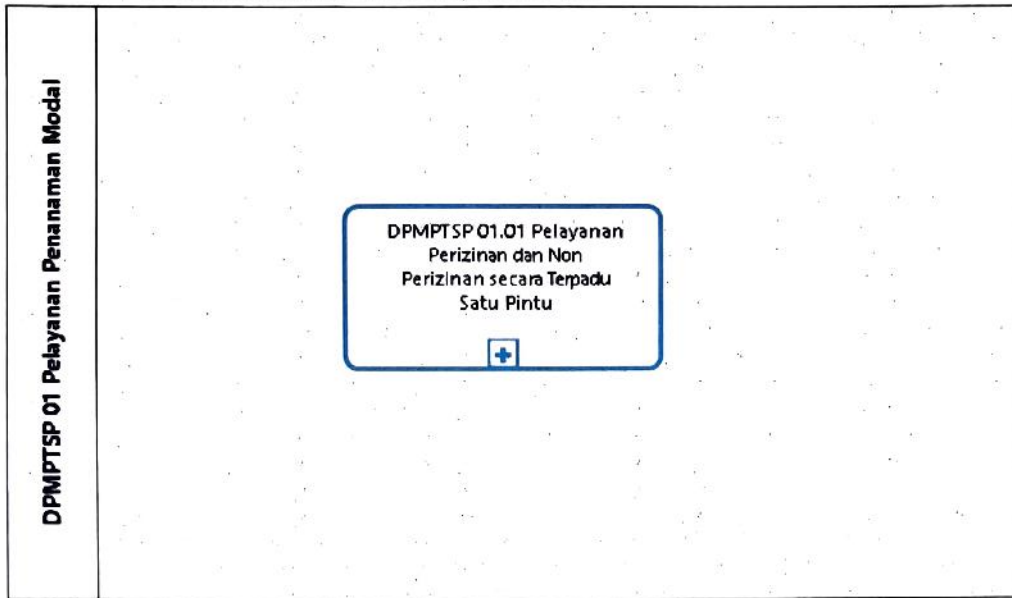
Proses Bisnis Level 0 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi



Paraf Koordinasi	
Pt. Sekretaris DPMPTSP	Y
Kabag Organisasi	R R

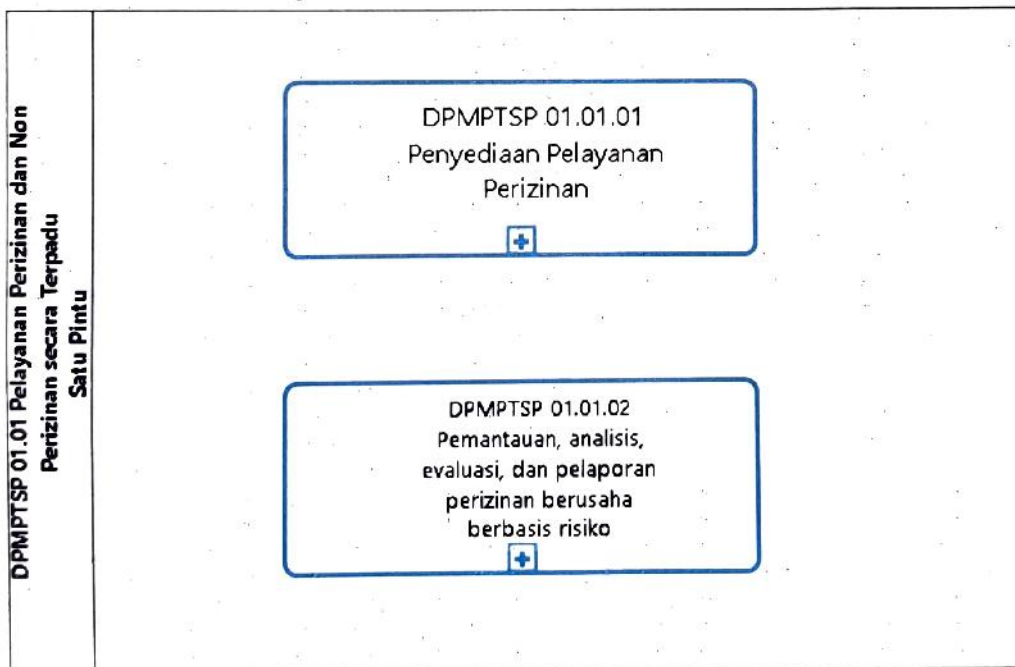
Proses Bisnis Level 1 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Bekasi

DPMPTSP 01 Pelayanan Penanaman Modal



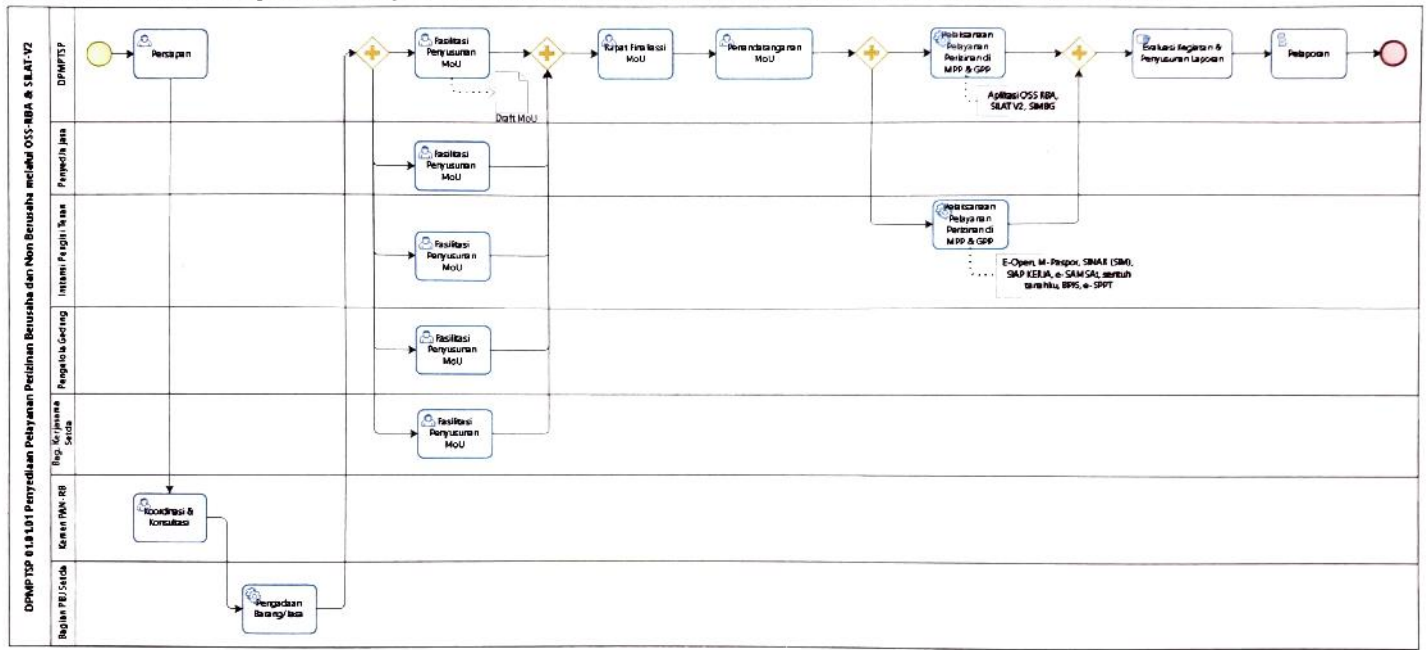
Proses Bisnis Level 2 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Bekasi

DPMPTSP 01.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu



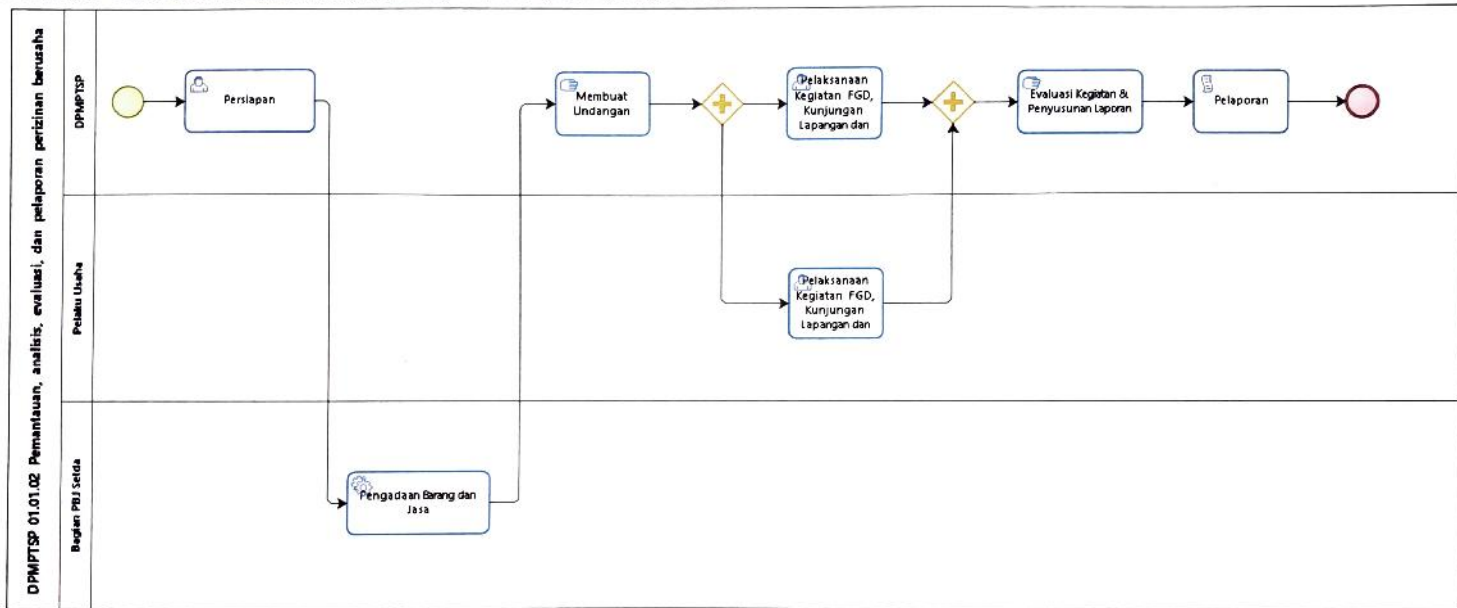
Paraf Koordinasi	
Plt. Sekretaris DPMPTSP	r
Kabag Organisasi	f la

Cross Functional Map Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
DPMPTSP 01.01.01 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha melalui OSS-RBA & SILAT-V2



Paraf Koordinasi	
Plt. Sekretaris DPMPTSP	r
Kabag Organisasi	A R

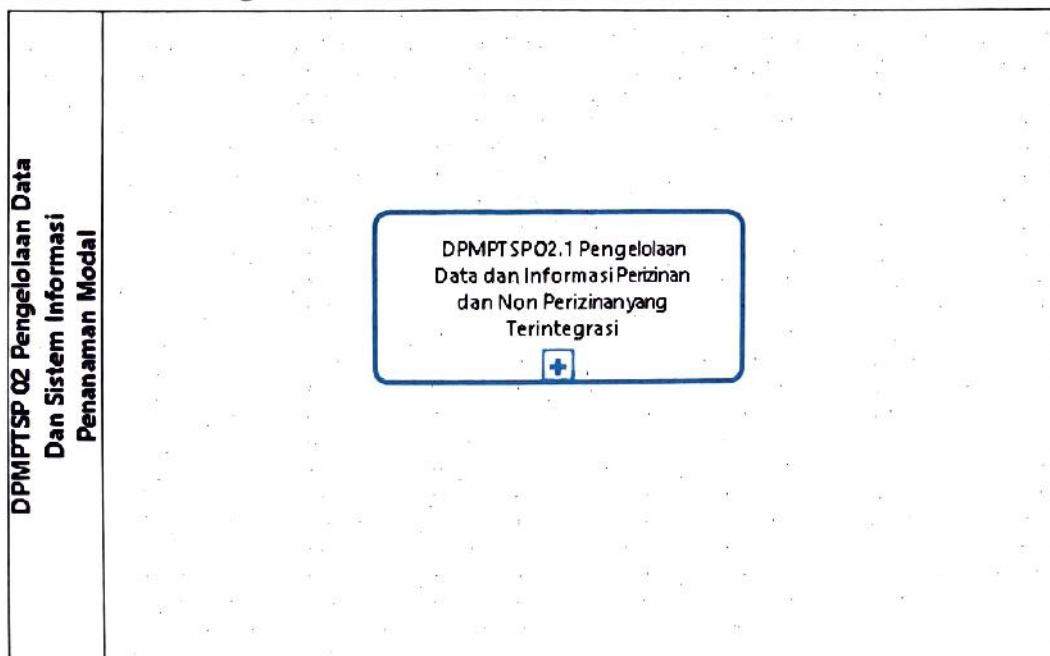
Cross Functional Map Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
DPMPTSP 01.01.02 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan perizinan berusaha



Paraf Koordinasi	
Plt. Sekretaris DPMPTSP	<i>r</i>
Kabag Organisasi	<i>g</i> <i>pu</i>

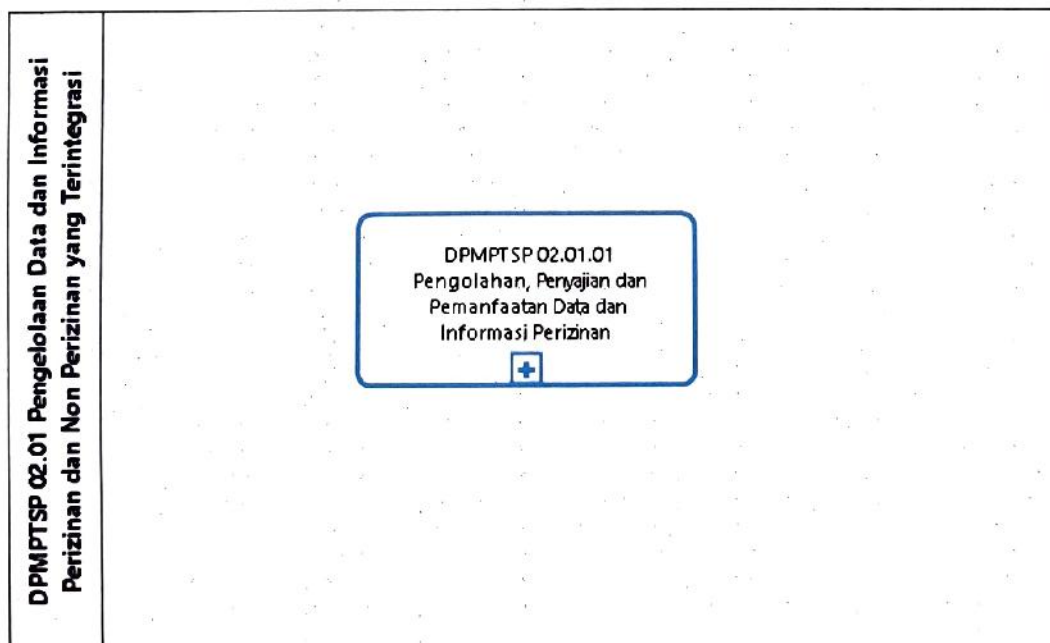
Proses Bisnis Level 1 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

DPMPTSP 02 Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal



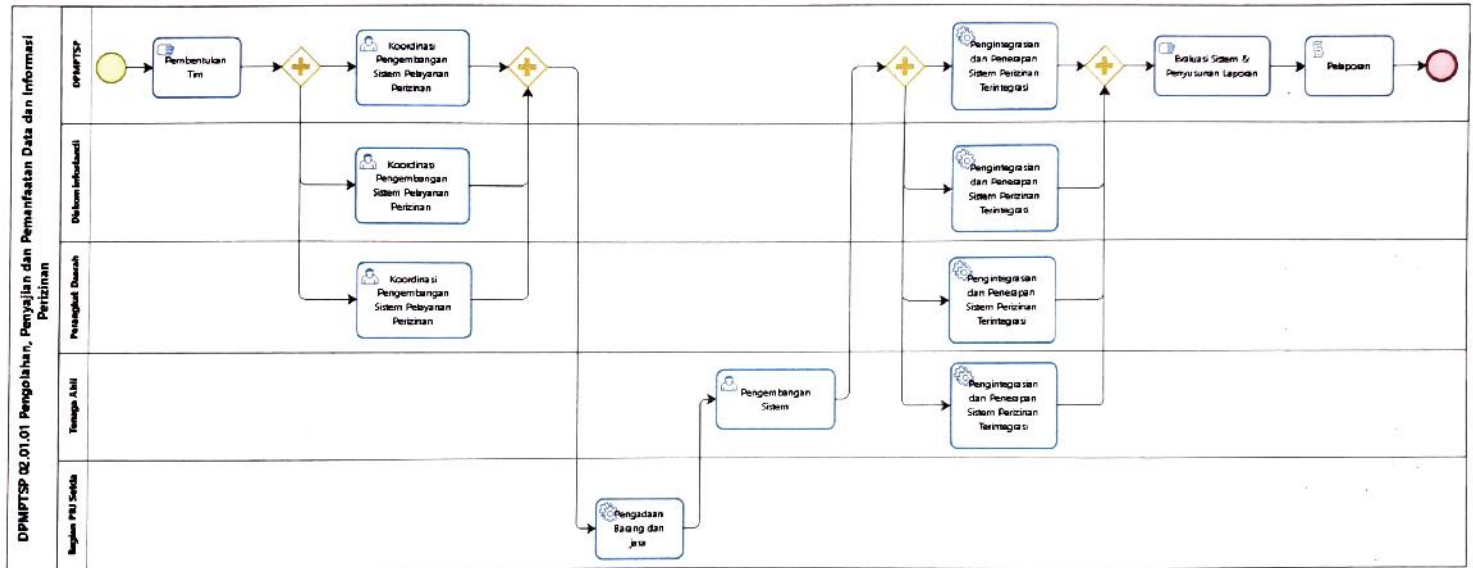
Proses Bisnis Level 2 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

DPMPTSP 02.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi



Paraf Koordinasi	
Plt. Sekretaris DPMPTSP	<i>Y</i>
Kabag Organisasi	<i>g R</i>

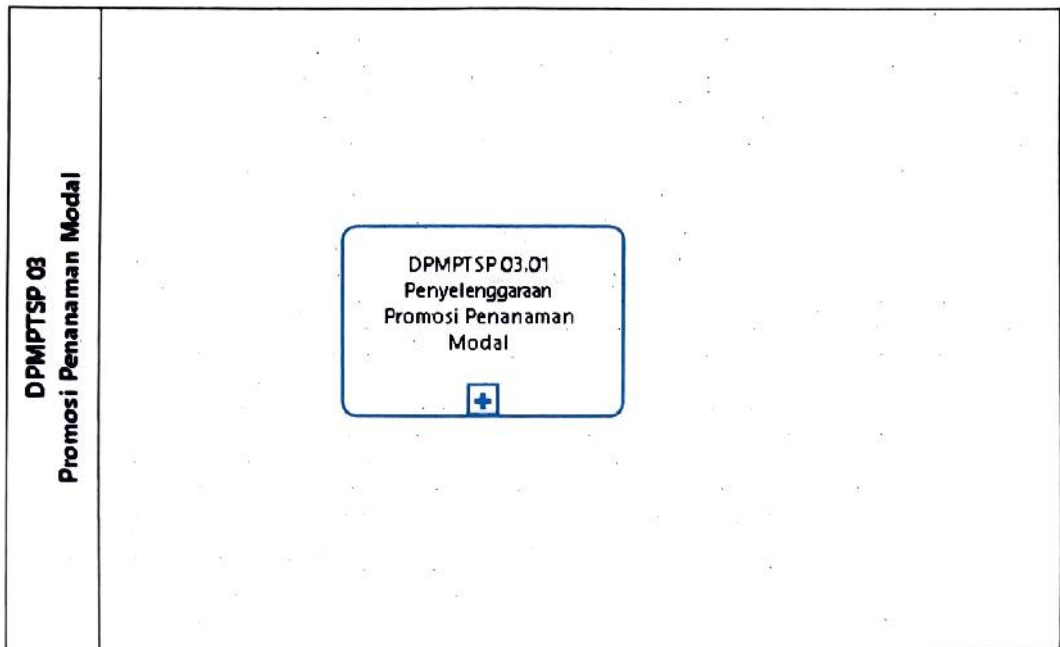
Cross Functional Map Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
DPMPTSP 02.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan



Paraf Koordinasi	
Plt. Sekretaris DPMPTSP	[Signature]
Kabag Organisasi	[Signature]

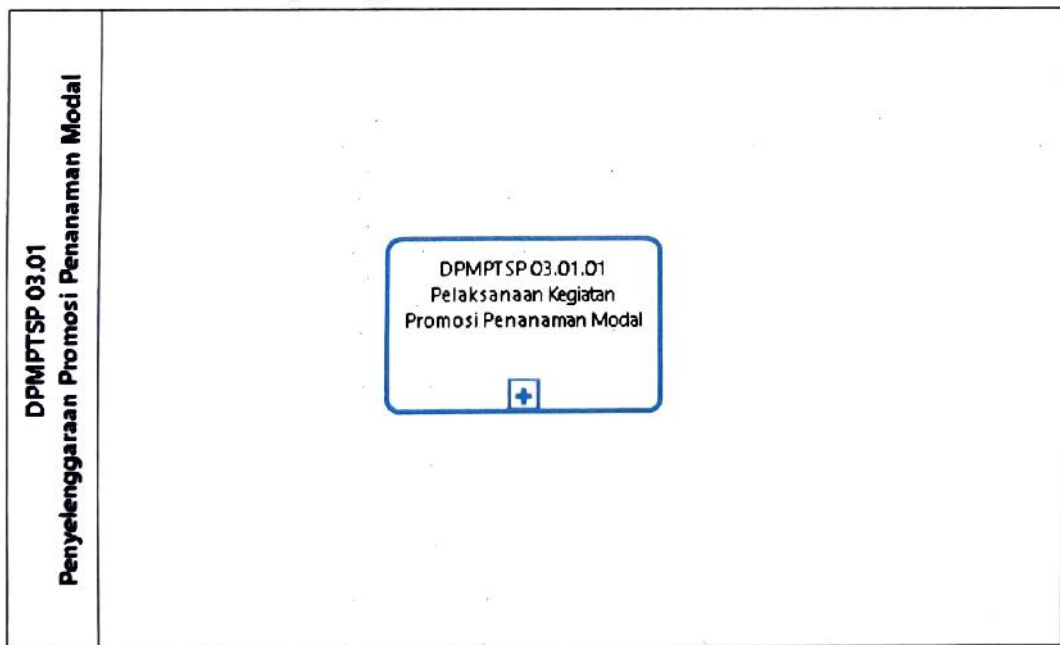
Proses Bisnis Level 1 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Bekasi

DPMPTSP 03 Promosi Penanaman Modal



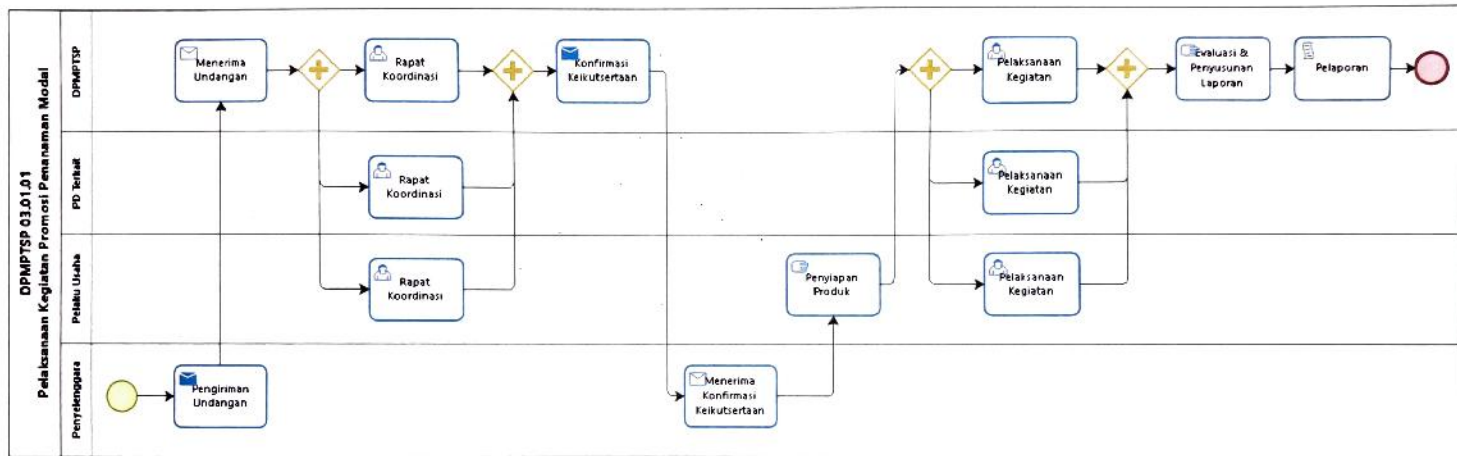
Proses Bisnis Level 2 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Bekasi

DPMPTSP 03.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal



Paraf Koordinasi	
Plt. Sekretaris DPMPTSP	
Kabag Organisasi	

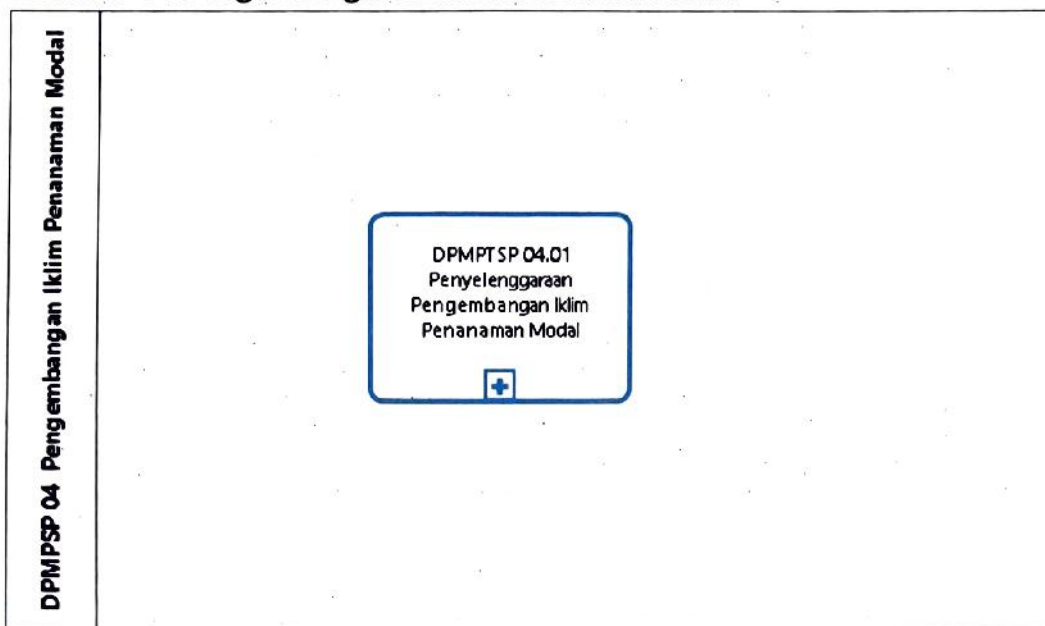
Cross Functional Map Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
DPMPTSP 03.01.01 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal



Paraf Koordinasi	
Plt. Sekretaris DPMPTSP	/
Kabag Organisasi	/ R

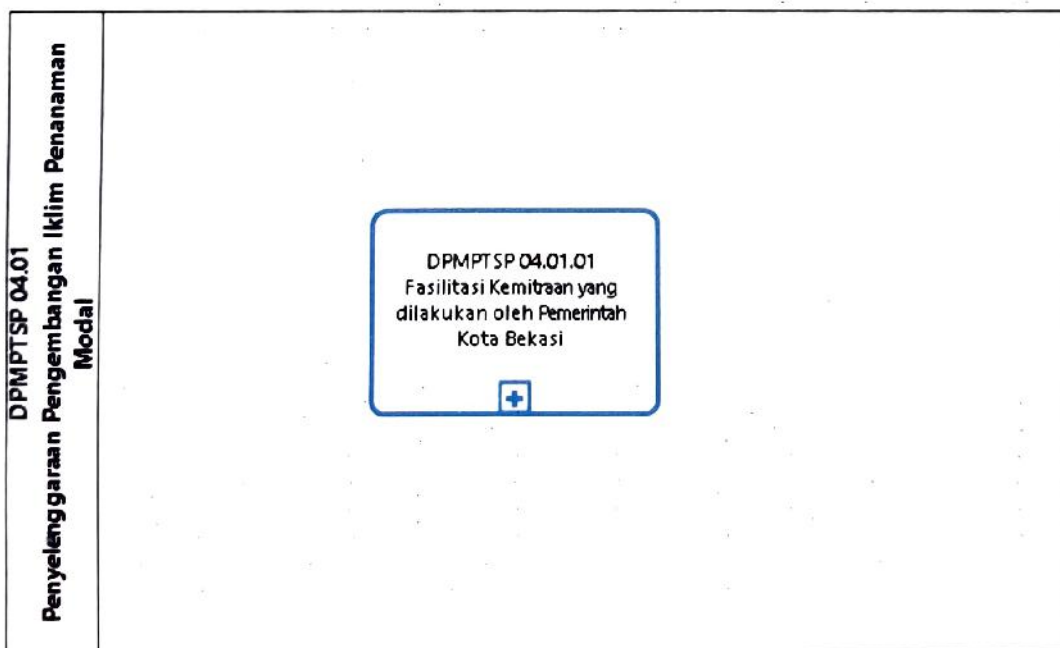
Proses Bisnis Level 1 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Bekasi

DPMPTSP 04 Pengembangan Iklim Penanaman Modal



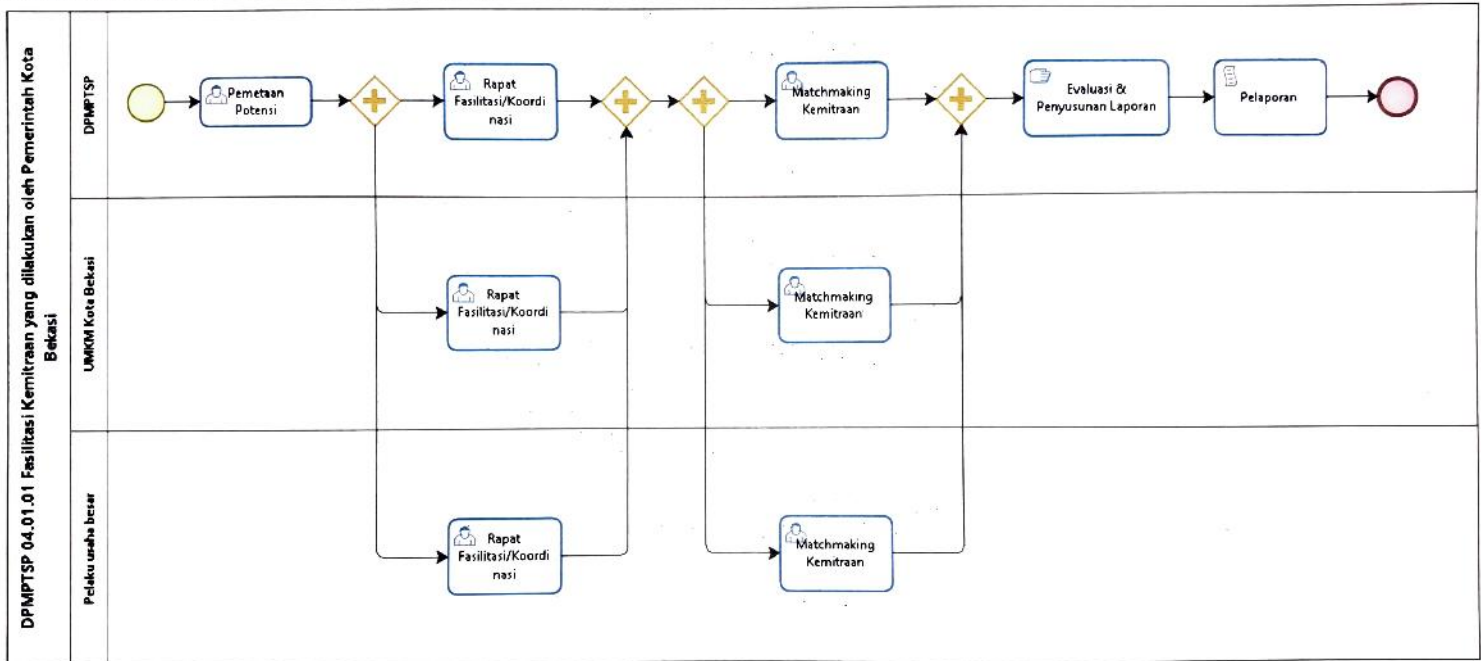
Proses Bisnis Level 2 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Bekasi

DPMPTSP 04.01 Penyelenggaraan Pengembangan Iklim Penanaman Modal



Paraf Koordinasi	
Plt. Sekretaris DPMPTSP	R
Kabag Organisasi	A

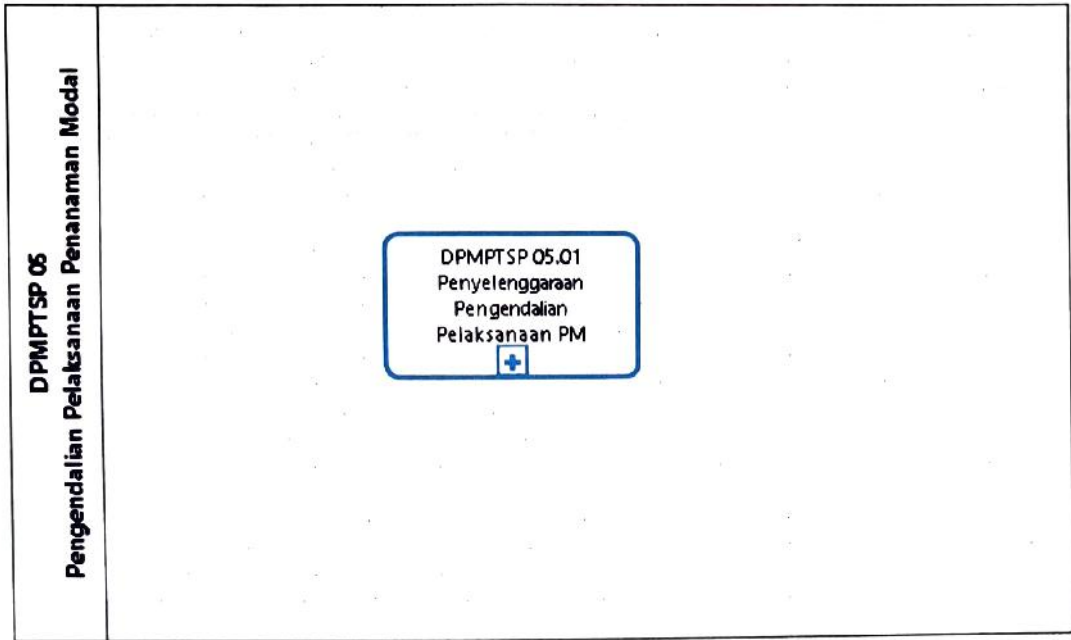
Cross Functional Map Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
DPMPTSP 04.01.01 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi



Paraf Koordinasi	
Plt. Sekretaris DPMPTSP	P
Kabag Organisasi	H Q

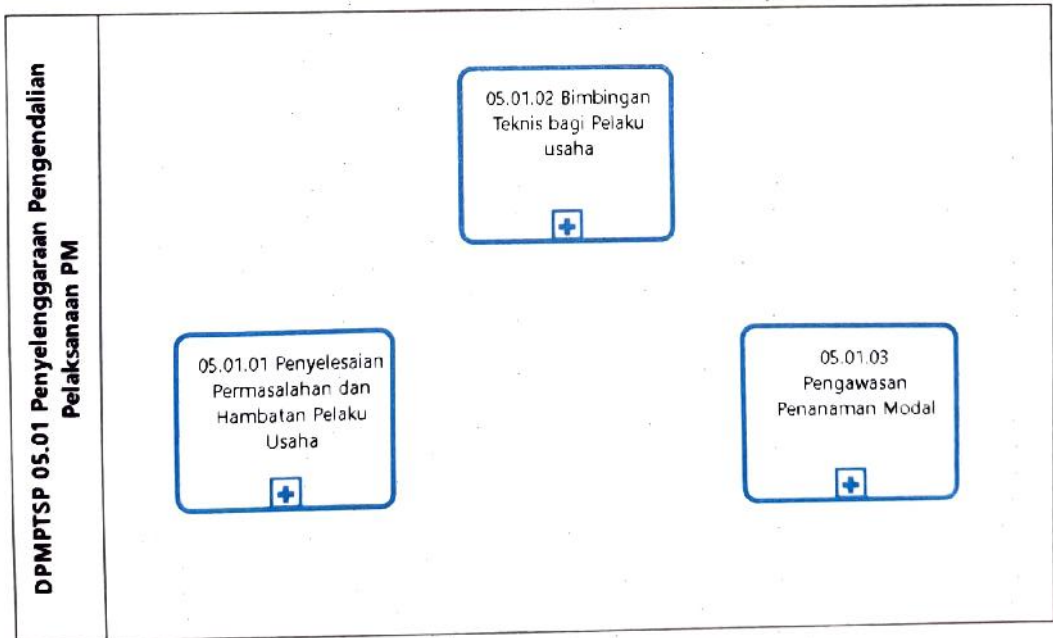
Proses Bisnis Level 1 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Bekasi

DPMPTSP 05 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



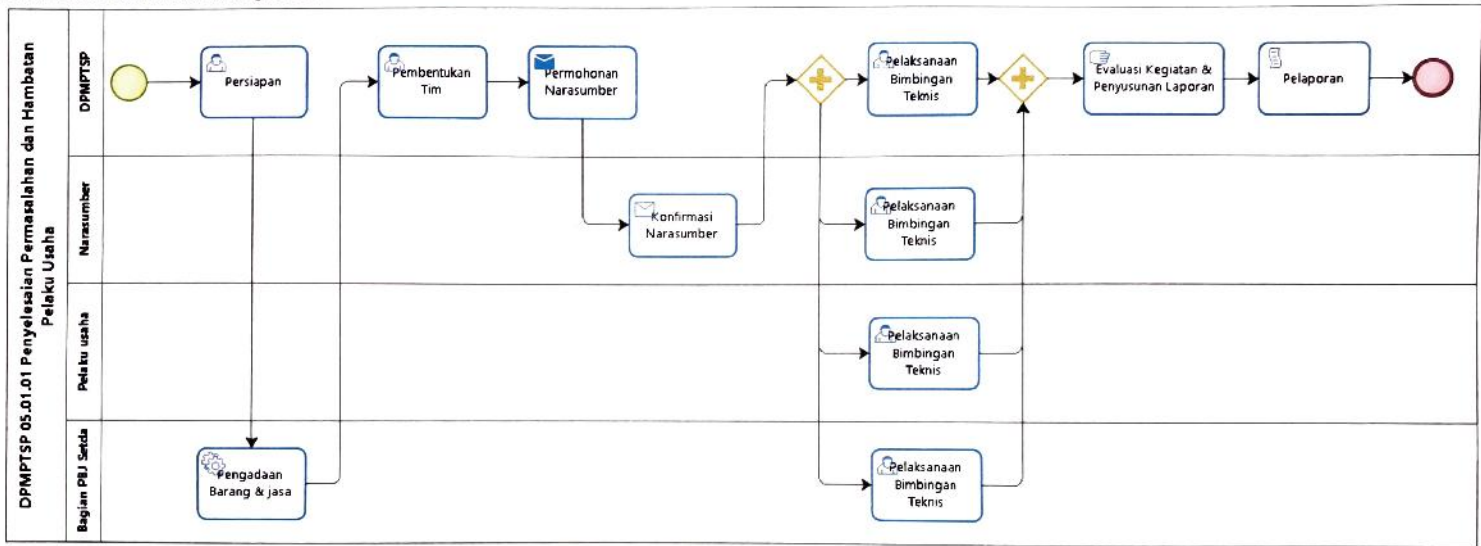
Proses Bisnis Level 2 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Bekasi

DPMPTSP 05.01 Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan PM



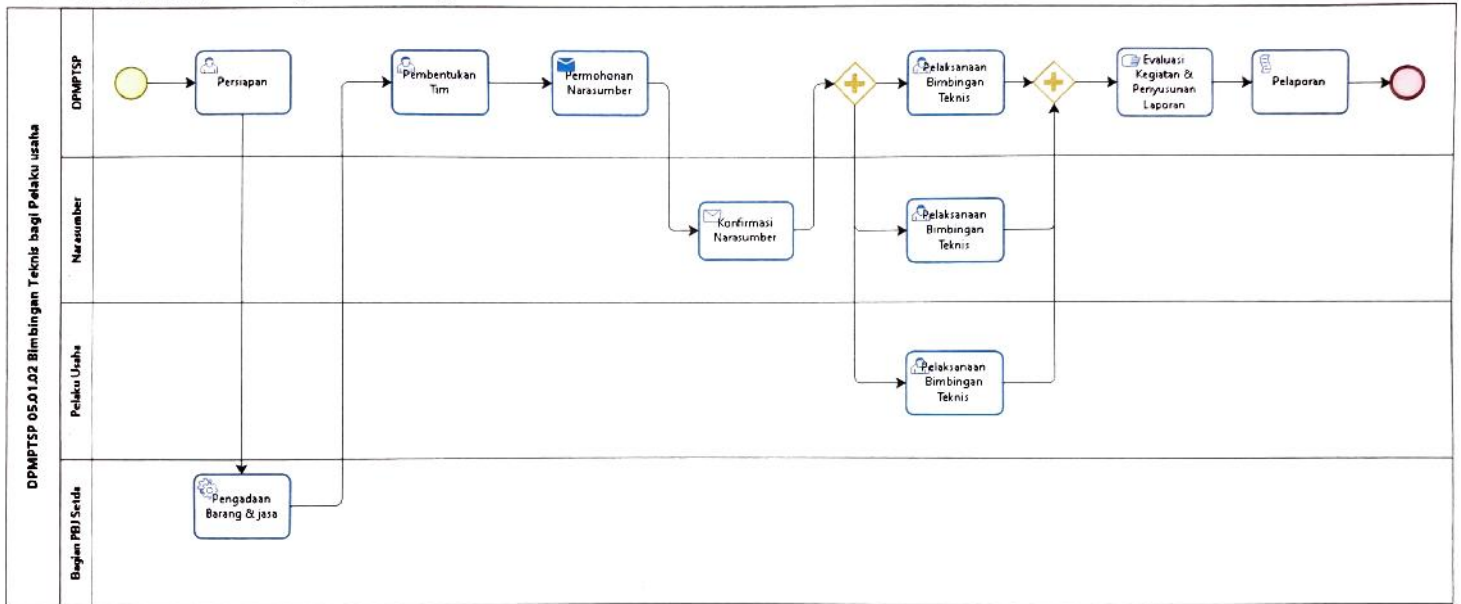
Paraf Koordinasi		
Plt. Sekretaris DPMPTSP		<i>K</i>
Kabag Organisasi	<i>P</i>	<i>Pc</i>

Cross Functional Map Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
DPMPTSP 05.01.01 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha



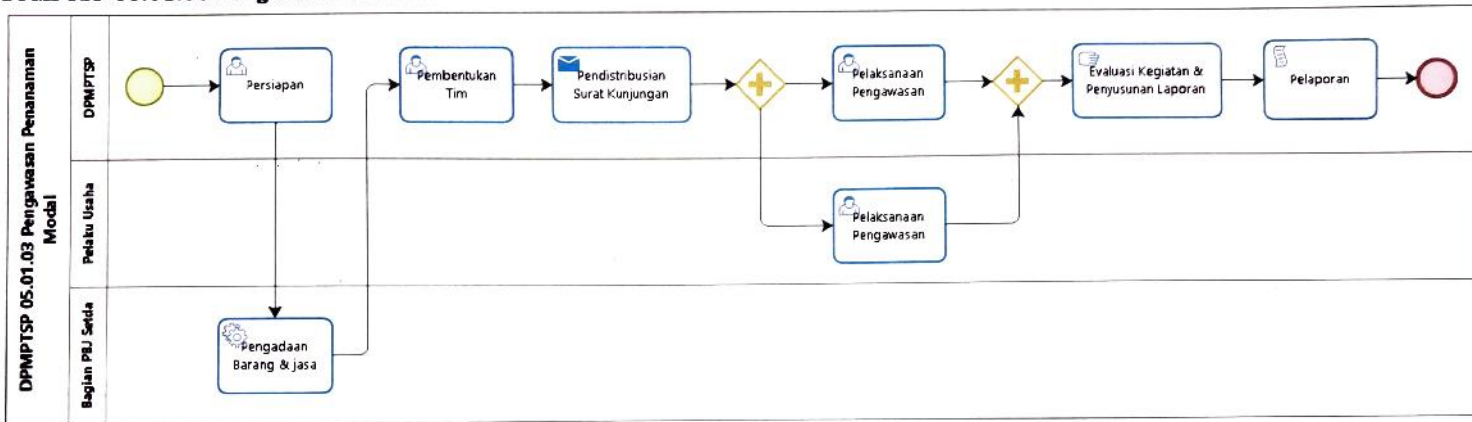
Paraf Koordinasi	
Plt. Sekretaris DPMPTSP	F
Kabag Organisasi	R

Cross Functional Map Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi :
DPMPTSP 05.01.02 Bimbingan Teknis bagi Pelaku usaha



Paraf Koordinasi	
Plt. Sekretaris DPMPTSP	F
Kabag Organisasi	H R

Cross Functional Map Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
DPMPTSP 05.01.03 Pengawasan Penanaman Modal





Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris DPMPTSP	r
Kabag Organisasi	ff

Plt. KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA BEKASI,

PRIADI SANTOSO

MATRIKS LEVEL DAN PENGAMPU

LEVEL 0		LEVEL 1		LEVEL 2		Cross Functional Map (CFM)	PENGAMPU
DPMPTSP 01	Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP 01.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP 01.01.01	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha melalui OSS-RBA & SILAT-V2	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha melalui OSS-RBA & SILAT-V2	TIM Perizinan
				DPMPTSP 01.01.02	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Berusaha berbasis Risiko	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Berusaha berbasis Risiko	TIM Perizinan
DPMPTSP 02	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP 02.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	DPMPTSP 02.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan	TIM Perizinan
DPMPTSP 03	Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP 03.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP 03.01.01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	TIM PM

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris DPMPTSP	
Kabag Organisasi	

LEVEL 0		LEVEL 1		LEVEL 2		Cross Functional Map (CFM)	PENGAMPU
DPMPTSP 04	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP 04.01	Penyelenggaraan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP 04.01.01	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi	TIM PM
DPMPTSP 05	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP 05.01	Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP 05.01.01	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	TIM PM
				DPMPTSP 05.01.02	Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha	Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha	TIM PM
				DPMPTSP 05.01.03	Pengawasan Penanaman Modal	Pengawasan Penanaman Modal	TIM PM

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris DPMPTSP	
Kabag Organisasi	

Plt. KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI,



PRIADI SANTOSO